

## PUBLIKASI KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025



TEUKU MULYA, ST, MT  
KEPALA DINAS

DKP Kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan fungsi yang melekat yaitu Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, keamanan pangan, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan, serta distribusi dan cadangan pangan pangan ; dan Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, dengan ini disampaikan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2024, sebagai berikut:

### 1. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

#### ➤ Kelompok Substansi Distribusi dan Harga Pangan

##### ○ Gerakan Pangan Murah (GPM)



Gerakan Pangan Murah (GPM) Istimewa merupakan program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta melindungi daya beli masyarakat. Pada periode 2024–2025, harga pangan strategis menunjukkan dinamika, dengan beberapa komoditas mengalami fluktuasi musiman, sementara komoditas pokok utama relatif stabil. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,68 juta jiwa dan 1,82 juta KK, Kabupaten Bogor membutuhkan intervensi pangan yang efektif, menjangkau langsung masyarakat hingga tingkat kecamatan. GPM Istimewa hadir sebagai *economic buffer* melalui penyediaan pangan pokok dengan harga terjangkau serta penguatan sistem distribusi pangan daerah.

Tujuan dan Sasaran : Pelaksanaan GPM Istimewa bertujuan untuk:

1. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok strategis;
2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
3. Menjamin akses pangan murah, aman, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya rumah tangga rentan, yang tersebar di seluruh kecamatan.

- Sepanjang periode pelaksanaan, GPM Istimewa telah dilaksanakan sebanyak 546 kali kegiatan, dengan rincian:
- **64 kali** oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor;
  - **476 kali** oleh Pemerintah Kecamatan;
  - **3 kali** melalui APBD I Provinsi;
  - **3 kali** GPM Mandiri.

Kegiatan GPM menjangkau **40 kecamatan** secara merata dan bergilir. Total penerima manfaat tercatat sebanyak **375.000 orang**, terdiri dari **48.000 penerima manfaat** kegiatan GPM yang bersumber dari anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan **327.000 penerima manfaat** dari pelaksanaan oleh kecamatan.

Penyaluran Komoditas & Fasilitas Distribusi Pangan

- Total tonase pangan tersalurkan: 2.229.592 kg/liter, Tonase pelaksanaan oleh DKP: 325.513 kg/liter
- Komoditas utama: beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang, cabai, dan sayuran
- Nilai Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) anggaran DKP: Rp1.280.931.000
- Rata-rata penghematan per penerima manfaat (DKP): ± Rp26.700/orang

Perkembangan Rata-Rata Harga Pangan 2024–2025

Komoditas	2024	2025	Perubahan	Tren
Beras Premium	14.723	14.457	↓1,80%	Stabil, < HET
Beras Medium	13.228	12.865	↓2,75%	Stabil
Gula Pasir	17.426	17.958	↑3,05%	Stabil ↑ sedikit
Minyak Goreng	16.672	17.100	↑2,57%	Stabil ↑
Telur Ayam	28.167	28.410	↑0,86%	Aman
Daging Ayam	38.001	36.936	↓2,80%	Stabil
Daging Sapi	129.973	128.141	↓1,41%	Stabil
Tepung Terigu	10.124	9.392	↓7,23%	Stabil kuat
Cabai Keriting	46.183	51.983	↑12,56%	Volatil
Rawit Merah	49.771	60.251	↑21,06%	Volatil ekstrem
Bawang Merah	33.706	39.793	↑18,06%	Volatil
Bawang Putih	37.807	37.890	↑0,22%	Stabil turun

Stabilitas harga pangan pada tahun 2025 menunjukkan kontribusi GPM dalam menahan gejolak harga, terutama pada periode rawan inflasi.

Penguatan Keberlanjutan Program : Sebagai upaya memperkuat keberlanjutan stabilisasi harga pangan di luar kegiatan GPM, Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk **Saung Inflasi/Kios Pangan** sebagai titik layanan pangan murah permanen. Hingga tahun 2025, telah terbentuk **25 unit Saung Inflasi/Kios Pangan** yang tersebar di **11 kecamatan**. Saung Inflasi/Kios Pangan berfungsi sebagai penyedia pangan pokok dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan sebagai titik intervensi cepat saat terjadi gejolak harga.

Evaluasi **Kepuasan Masyarakat** : pelaksanaan GPM dilakukan melalui **Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) “SENYUM GPM”**, yang dilaksanakan secara daring dan langsung di lokasi kegiatan. Dari **586 responden**, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat baik, dengan **60% responden menyatakan sangat puas** dan **40% puas**, sehingga secara keseluruhan GPM masuk dalam kategori **“PUAS”**. Hasil ini menunjukkan bahwa GPM dinilai efektif, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kesimpulan : Secara keseluruhan, **Gerakan Pangan Murah (GPM) Istimewa Kabupaten Bogor** menunjukkan capaian kinerja yang kuat dan berdampak nyata. Dengan **546 kali pelaksanaan kegiatan**, distribusi **2,23 juta kg/liter pangan**, jangkauan **375.000 penerima manfaat**, penghematan rata-rata **±Rp26.700 per penerima manfaat**, serta dukungan **25 Saung Inflasi/Kios Pangan** di 11 kecamatan, GPM menjadi instrumen strategis dalam pengendalian harga pangan dan perlindungan daya beli masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Bogor.

➤ **Kelompok Substansi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor**

○ **Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Tahun 2025 (Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Dan Leuit)**

Ketahanan pangan daerah sering terganggu oleh fluktuasi produksi, keterbatasan fasilitas penyimpanan yang memadai, serta kondisi cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kualitas hasil panen. Banyak kelompok tani (poktan) belum memiliki sarana penyimpanan yang aman, sehingga gabah atau beras rentan rusak, terpapar hama, atau mengalami penurunan mutu. Untuk itu diperlukan tempat penyimpanan yang layak dan aman bagi pangan seperti lumbung dan leuit sebagai sarana penyimpanan berbasis kearifan lokal. Pembangunan lumbung dan leuit bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan di tingkat masyarakat.
2. Mengurangi potensi kehilangan hasil panen akibat penyimpanan yang tidak memadai.
3. Memperkuat ketahanan pangan desa dalam menghadapi keadaan darurat atau musim paceklik.



Tersedianya cadangan pangan di tingkat masyarakat sebesar 10% Gabah Kering Giling (GKG) dari total kapasitas lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Bogor. Kegiatan ini berfokus pada penyediaan infrastruktur cadangan pangan melalui pembangunan 6 unit Lumbung Pangan Masyarakat (kapasitas 40 ton) dan 8 unit Leuit (kapasitas 2 ton). Waktu Pelaksanaan : Lumbung Pangan Masyarakat (Juni s/d Sept 2025) dan Leuit (Mei s.d Juni 2025)

a) Lokasi dan Penerima Manfaat

Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	Pembangunan Leuit
Poktan Tunas Muda Mandiri – Desa Singasari, Kec. Jonggol	Poktan Mandiri Satu – Desa Kuta Mekar, Kec. Cariu
Poktan Rajin Kaum Tani – Desa Ciasihan, Kec. Pamijahan	Poktan Buana Sari – Desa Cikutamahi, Kec. Cariu
Poktan Tani Makmur – Desa Parakan Muncang, Kec. Nanggung	Paguyuban – Desa Kutamekar, Kec. Cariu
Poktan Tunas Karya – Desa Tanjungrasa, Kec. Tanjungsari	Poktan Mandiri Mulya Tani – Desa Sirnarasa, Kec. Tanjungsari
Poktan Sinar Maju Tani – Desa Sukawangi, Kec. Sukamakmur	Poktan Bina Sejahtera – Desa Sirnarasa, Kec. Tanjungsari
Poktan Jaya Mukti – Desa Cibadak, Kec. Tanjungsari	Poktan Warga Mukti – Desa Urug, Kec. Sukajaya (3 unit)

Dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan

A. Dampak Jangka Pendek

- Meningkatkan ketersediaan pangan
- Mengurangi kerentanan pangan
- Mendorong partisipasi anggota poktan dalam penguatan lumbung pangan masyarakat

B. Dampak Jangka Panjang

- Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan (tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar wilayah)
- Meningkatkan kesejahteraan petani (petani dapat menyimpan hasil panen dan menjualnya saat harga lebih menguntungkan)
- Mendukung stabilisasi harga pangan (lumbung pangan/leuit dapat berfungsi sebagai penyangga saat harga naik, sehingga harga lebih terkendali)
- Mendukung pembangunan berkelanjutan.

Evaluasi :

1. Sasaran target besaran angka jumlah cadangan pangan di tingkat masyarakat sebesar 10% GKG (Gabah Kering Giling) dari kapasitas Lumbung Pangan (yang difasilitasi Dinas Ketahanan Pangan) di wilayah Kabupaten Bogor di Tahun 2025 dengan jumlah lumbung pangan 32 unit dan leuit 8 unit adalah sebesar 129.600 kg.
2. Total jumlah stok Cadangan Pangan di tingkat masyarakat (Data akhir November 2025) yang terdapat di lumbung pangan dan leuit di wilayah Kab Bogor adalah sebesar 131.285 kg Gabah Kering Giling (GKG).
3. Secara umum sasaran target besaran angka jumlah cadangan pangan di tingkat masyarakat Kab Bogor Tahun 2025 dapat tercapai, namun pengisian lumbung pangan belum merata dilakukan sepenuhnya oleh masing-masing kelompok tani.
4. Volume stok cadangan pangan belum stabil sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat apabila mengalami kondisi darurat pangan.

Tindak Lanjut :

1. Melakukan secara rutin pembinaan, sosialisasi, pelatihan/bimtek terkait Fungsi dan Manfaat Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Masyarakat serta cara pengelolaannya.
2. Membuat kebijakan terkait jumlah cadangan pangan masyarakat yang wajib dikelola oleh poktan penerima manfaat bantuan lumbung pangan masyarakat



○ **Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Pengadaan Dan Penyaluran CPPD 2025)**



Target Angka Ideal CPPD Kabupaten Bogor sebagai upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor adalah sebesar 492,14 ton (Sesuai dengan Perhitungan CPPD Ideal berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Surat DKPP Provinsi Jawa Barat Nomor 12378/PT.09.01/PEREK bulan Desember Tahun 2024 tentang Himbauan Optimalisasi Anggaran Untuk Penyediaan CPPD di Kabupaten/Kota dan Desa).

Tujuan :

1. Menjamin ketersediaan dan akses pangan yang cukup bagi masyarakat terdampak bencana.
2. Mengurangi dampak buruk bencana dan mendukung pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca bencana.
3. Mewujudkan sistem Ketahanan Pangan Daerah yang berkelanjutan.
4. Mendukung stabilitas pangan di daerah.

Sasaran :

1. Tersedianya CPPD dalam jumlah yang cukup, jenis dan mutu yang sesuai standar Target Tahun 2025 yaitu tersedianya CPPD sebesar 84 ton)
2. Terpenuhinya kebutuhan logistik pangan untuk penanggulangan keadaan darurat pangan.
3. Tersalurkannya CPPD Kabupaten Bogor kepada masyarakat terdampak bencana secara optimal, cepat dan tepat (Target sebesar 65 ton)  
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya kelaparan atau krisis pangan akibat bencana

Pengadaan CPPD Kabupaten Bogor

1. Pengadaan tahap 1 (Maret 2025) sebanyak 65.900 kg
2. Pengadaan tahap 2 (Desember 2025) sebanyak 95.300 kg

Jumlah Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut :

Rincian	Produk CPPD	Keterangan
	Beras (kg)	
Stok Awal Januari 2025	469.126,02	
Stok Februari 2025	469.126,02	Stok Beras CPPD (- 23.013,98 Kg)
Penyaluran Tahap I (Maret)	- 11.690,00	
Stok Akhir Maret 2025	457.436,02	Stok Beras CPPD (- 34.703,98 Kg)
Pengadaan Tahun 2025 Tahap 1 (April)	+ 65.900,00	
Stok Akhir April 2025	523.336,02	Stok Beras CPPD (+ 31.196,02 Kg)
Penyaluran Tahap II (Juni)	-22.860,00	
Penyusutan	-6.968,65	
Penyaluran BPBD	-2.000,00	
Stok Akhir Juli 2025	491.507,37	Stok Beras CPPD (-632,63 Kg)
Penyaluran Tahap III (September)	-29.430,00	
Stok Akhir September 2025	462.077,37	Stok Beras CPPD (-30.062,63 Kg)
Penyaluran Tahap IV (Desember)	-36.572,5	
Rekon November dan Desember 2025	-6.601,60	
Pengadaan Tahun 2025 Tahap 2 (Desember)	+95.300,00	
Stok Akhir Desember 2025	514.203,26	Stok Beras CPPD (+ 22.063,26 Kg)

○ **Penyaluran CPPD Kabupaten Bogor**

Total jumlah bantuan beras CPPD Kab. Bogor yang didistribusikan bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bogor sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 adalah sebesar 102.55 ton, dengan rincian sebagai berikut :

- A. Penyaluran tahap 1 (Maret 2025) sebanyak 11.690 kg
1. Kecamatan Ciampea sebanyak 265 kg, 19 Jiwa, 5 KK.
  2. Kecamatan Cigudeg sebanyak 370 kg, 35 Jiwa, 10 KK.
  3. Kecamatan Nanggung sebanyak 660 kg, 88 Jiwa, 22 KK.
  4. Kecamatan Cibungbulang sebanyak 4.015 kg, 535 Jiwa, 139 KK.
  5. Kecamatan Tajurhalang sebanyak 120 kg, 12 Jiwa, 10 KK.
  6. Kecamatan Bojonggede sebanyak 650 kg, 85 Jiwa, 23 KK.
  7. Kecamatan Cibinong sebanyak 1.095 kg, 132 Jiwa, 39 KK.
  8. Kecamatan Caringin sebanyak 540 kg, 72 Jiwa, 23 KK.

9. Kecamatan Cijeruk sebanyak 608 kg, 81 Jiwa, 18 KK.
10. Kecamatan Cigombong sebanyak 668 kg, 89 Jiwa, 21 KK.
11. Kecamatan Kemang sebanyak 135 kg, 9 Jiwa, 2 KK.
12. Kecamatan Megamendung sebanyak 765 kg, 102 Jiwa, 25 KK.
13. Kecamatan Sukamakmur sebanyak 1.665 kg, 222 Jiwa, 61 KK.
14. Kecamatan Jonggol sebanyak 135 kg, 9 Jiwa, 3 KK.

B. Penyaluran tahap 2 (Juni 2025) sebanyak 22.860 kg

1. Kecamatan Cigudeg sebanyak 392,5 kg, 40 Jiwa, 9 KK.
2. Kecamatan Parung Panjang sebanyak 4.680 kg, 624 Jiwa, 160 KK.
3. Kecamatan Jasinga sebanyak 420 kg, 42 Jiwa, 11 KK.
4. Kecamatan Kemang sebanyak 235 kg, 17 Jiwa, 4 KK.
5. Kecamatan Bojonggede sebanyak 290 kg, 25 Jiwa, 5 KK.
6. Kecamatan Tajurhalang sebanyak 437,5 kg, 51 Jiwa, 17 KK.
7. Kecamatan Caringin sebanyak 1.150 kg, 115 Jiwa, 38 KK.
8. Kecamatan Cijeruk sebanyak 210 kg, 20 Jiwa, 6 KK.
9. Kecamatan Ciomas sebanyak 1.515 kg, 101 Jiwa, 29 KK.
10. Kecamatan Megamendung sebanyak 280 kg, 25 Jiwa, 6 KK.
11. Kecamatan Sukamakmur sebanyak 4.492,5 kg, 599 Jiwa, 157 KK.
12. Kecamatan Cariu sebanyak 4.320 kg, 576 Jiwa, 190 KK.
13. Kecamatan Klapanunggal sebanyak 80 kg, 8 Jiwa, 2 KK.
14. Kecamatan Jonggol sebanyak 220 kg, 22 Jiwa, 6 KK.
15. Kecamatan Ciampea sebanyak 2.397,5 kg, 285 Jiwa, 79 KK.
16. Kecamatan Cibungbulang sebanyak 250 kg, 18 Jiwa, 5 KK.
17. Kecamatan Leuwiliang sebanyak 720 kg, 48 Jiwa, 15 KK.
18. Kecamatan Nanggung sebanyak 770 kg, 77 Jiwa, 22 KK.

C. Penyaluran Tanggap Darurat (Juli 2025) sebanyak 2.000 kg

(Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 300.2/22/KEP-TD/BPBD tentang Penetapan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di Kecamatan Megamendung, Leuwisadeng, Kemang, Tamansari, Cisarua, Cijeruk, Dramaga, Tenjolaya, Caringin, Cibungbulang, Ciomas, Ciampea, Ciawi, Cigombong, Sukamakmur, Rancabungur, Cigudeg, Babakan Madang, Citeureup, Gunung Putri, Sukaraja, Klapanunggal, Jonggol, Cileungsi, Tajurhalang dan Leuwiliang)



D. Penyaluran tahap 3 (September 2025) sebanyak 29.430 kg

1. Kecamatan Cibungbulang sebanyak 1.110 kg, 98 Jiwa, 28 KK.
2. Kecamatan Pamijahan sebanyak 165 kg, 11 Jiwa, 2 KK.
3. Kecamatan Ciampea sebanyak 350 kg, 29 Jiwa, 10 KK.
4. Kecamatan Rumpin sebanyak 1.712,5kg, 214 Jiwa, 42 KK.
5. Kecamatan Nanggung sebanyak 1.560 kg, 104 Jiwa, 27 KK.
6. Kecamatan Cigudeg sebanyak 495 kg, 33 Jiwa, 7 KK.
7. Kecamatan Jasinga sebanyak 980 kg, 71 Jiwa, 22 KK.
8. Kecamatan Megamendung sebanyak 5.155 kg, 651 Jiwa, 178 KK.
9. Kecamatan Caringin sebanyak 2.655 kg, 203 Jiwa, 56 KK.
10. Kecamatan Ciomas sebanyak 5.990 kg, 465 Jiwa, 131 KK.
11. Kecamatan Cijeruk sebanyak 850 kg, 76 Jiwa, 19 KK.
12. Kecamatan Cigombong sebanyak 495 kg, 33 Jiwa, 10 KK.
13. Kecamatan Bojonggede sebanyak 870 kg, 62 Jiwa, 16 KK.
14. Kecamatan Tajurhalang sebanyak 570 kg, 57 Jiwa, 13 KK.
15. Kecamatan Kemang sebanyak 2.272,5 kg, 296 Jiwa, 88 KK.
16. Kecamatan Cibinong sebanyak 2.312,5 kg, 235 Jiwa, 72 KK.
17. Kecamatan Cariu sebanyak 45 kg, 3 Jiwa, 1 KK.
18. Kecamatan Sukamakmur sebanyak 1.602,5 kg, 139 Jiwa, 34 KK.
19. Kecamatan Jonggol sebanyak 240 kg, 16 Jiwa, 44 KK

E. Penyaluran tahap 4 (Desember 2025) sebanyak 36.572,5 kg

1. Kecamatan Ciampea sebanyak 1.102,5 kg, 16 Jiwa, 4 KK.
2. Kecamatan Cibungbulang sebanyak 4.690 kg, 16 Jiwa, 4 KK.
3. Kecamatan Pamijahan sebanyak 2.930 kg, 16 Jiwa, 4 KK.
4. Kecamatan Rumpin sebanyak 750 kg, 16 Jiwa, 4 KK.
5. Kecamatan Nanggung sebanyak 555 kg, 16 Jiwa, 4 KK.
6. Kecamatan Cigudeg sebanyak 342,5 kg, 16 Jiwa, 4 KK.
7. Kecamatan Jasinga sebanyak 1.502,5 kg, 16 Jiwa, 4 KK.
8. Kecamatan Kemang sebanyak 3.300 kg, 16 Jiwa, 4 KK.
9. Kecamatan Tajurhalang sebanyak 220 kg, 29 Jiwa, 4 KK.

10. Kecamatan Cibinong sebanyak 1.455 kg, 192 Jiwa, 54 KK.
11. Kecamatan Megamendung sebanyak 322,5 kg, 43 Jiwa, 10 KK.
12. Kecamatan Ciomas sebanyak 3.722,5 kg, 471 Jiwa, 121 KK.
13. Kecamatan Caringin sebanyak 4.707,5 kg, 619 Jiwa, 151 KK.
14. Kecamatan Cijeruk sebanyak 382,5 kg, 48 Jiwa, 12 KK.
15. Kecamatan Sukamakmur sebanyak 855 kg, 103 Jiwa, 29 KK.
16. Kecamatan Jonggol sebanyak 162,5 kg, 17 Jiwa, 6 KK.
17. Kecamatan Cariu sebanyak 317,5 kg, 42 Jiwa, 14 KK.
18. Kecamatan Cigombong sebanyak 8.737,5 kg, 1.165 Jiwa, 280 KK.
19. Kecamatan Bojonggede sebanyak 517,5 kg, 55 Jiwa, 15 KK

#### Evaluasi dan Tindak Lanjut

##### Evaluasi :

1. Pemerintah Kab. Bogor telah menyediakan CPPD berupa beras sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana.
2. Jumlah stok CPPD yang tersedia di akhir September 2025 adalah sebesar 462.077,37 kg, hal ini tidak memenuhi angka ideal CPPD Kab Bogor (492,14 ton) sehingga diajukan anggaran di perubahan, untuk melakukan pengadaan CPPD Tahap 2 sebanyak 95.300 kg. Target angka ideal CPPD Kab. Bogor di Bulan Desember Tahun 2025, dapat tercapai, yaitu sebesar 514.20 ton.
3. Perencanaan pengadaan CPPD Kab. Bogor masih perlu disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah Kab. Bogor.
4. Total jumlah bantuan beras CPPD Kab. Bogor yang didistribusikan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 melebihi target penyaluran CPPD Tahun 2025 (65 ton) yaitu sebesar 102.55 ton.

Pengajuan bantuan CPPD Kab. Bogor masih dilakukan secara manual dari desa ke kecamatan, lalu dari kecamatan ke Dinas Ketahanan Pangan.

##### Tindak Lanjut :

1. Penambahan alokasi anggaran pengadaan CPPD Kab. Bogor perlu diutamakan dan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai target angka ideal setiap tahunnya.
2. Diperlukan prosedur pengajuan bantuan CPPD secara digital agar distribusi bantuan CPPD bagi masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan lebih cepat, transparan dan tepat sasaran.

## 2. Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi penyelenggaraan fasilitasi ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan. Sebagai pelaksanaan dari fungsi tersebut bidang ketersediaan dan kerawanan pangan melaksanakan kegiatan :

### ➤ **Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan**

Pangan merupakan pondasi utama dalam menciptakan ketahanan pangan yang berarti kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang mencerminkan kedaulatan bangsa, keamanan dan kesejahteraan. Ketahanan pangan itu sendiri terdiri dari 3 pilar utama/aspek yaitu :

- Aspek Ketersediaan
- Aspek Aksesibilitas (atau keterjangkauan), dan
- Aspek Pemanfaatan (penggunaan pangan)

Aspek ketersediaan pangan mengacu pada kondisi tersedianya bahan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk, baik dari produksi domestik, cadangan daerah, maupun impor antar daerah, serta harus stabil dari waktu ke waktu. Ketersediaan juga mencakup faktor produksi (luas lahan, sarana prasarana), infrastruktur distribusi (transportasi), hingga stabilitas pasokan (produksi per kapita), yang semuanya memastikan pangan tersedia secara fisik dan tidak fluktuatif. Melalui Substansi Ketersediaan Pangan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, pada Tahun 2025 ini mengampu 2 Sub Kegiatan utama, diantaranya yaitu :

- a. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- b. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

#### ○ Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

Tahun 2025 ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor melalui Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan telah memberikan bantuan kepada beberapa kelompok tani (poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) terkait infrastruktur kemandirian pangan lainnya yaitu berupa :

- Bangunan dan mesin penggiling padi / Rice Milling Unit (RMU) sebanyak 4 unit.
- Lantai Jemur sebanyak 4 unit.
- Bangunan dan mesin pengering gabah / Bed Dryer sebanyak 1 unit.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Masyarakat terkait fasilitas pendukung kemandirian pangan yang bertujuan untuk :

- Membangun infrastruktur kemandirian pangan di kelompok tani atau gabungan kelompok tani agar menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa bersaing di pasaran.
- Memperkuat ketahanan pangan daerah.
- Meningkatkan pendapatan petani.

Kriteria yang ditetapkan oleh dinas dalam memilih kelompok penerima manfaat adalah sebagai berikut :

- Merupakan kelompok tani atau Gabungan kelompok tani dan bukan merupakan individu perorangan.
- Poktan atau gapoktan pengaju sudah terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Penyuluhan Pertanian).
- Lahan yang akan digunakan untuk dibuat bangunan merupakan lahan yang telah dihibahkan oleh Masyarakat setempat untuk dimanfaatkan oleh poktan atau gapoktan untuk menghindari klaim pengakuan dari pihak keluarga pemberi hibah kedepannya.
- Sudah memiliki izin dan persetujuan untuk membangun bangunan tersebut dari penduduk sekitar.
- Pengajuan berupa proposal yang telah ditandatangani, disetujui dan diketahui oleh Koordinator Penyuluh dan penyuluh serta Kepala Desa setempat.
- Poktan atau gapoktan penerima manfaat mempunyai skala usaha pengolahan beras.



Berikut merupakan kelompok tani dan gabungan kelompok tani penerima bantuan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya di Kabupaten Bogor Tahun 2025 :

a) Penerima Bantuan Bangunan dan Mesin Penggiling Padi (Rice Milling Unit / RMU) tahun 2025

No	Nama Kelompok	Alamat	Nama Ketua
1	Poktan Karya Makmur I	Desa Babakanraden Kec. Cariu	Saim Makmur
2	Poktan Setia Warga	Desa Ciburayut Kec. Cigombong	Hasanudin
3	Poktan Warga Jaya	Desa Leuwisadeng Kec. Leuwisadeng	Jeni Mulyadi
4	Poktan Sinar Sejati	Desa Sirnarasa Kec. Tanjungsari	Nunuh

b) Penerima Bantuan Lantai Jemur Tahun 2025

No	Nama Kelompok	Alamat	Nama Ketua
1	Poktan Karya Makmur I	Desa Babakanraden Kec. Cariu	Saim Makmur
2	Poktan Bersama	Desa Singajaya Kec. Jonggol	H. Sarnan
3	Poktan Karangsari	Desa Mekarwangi Kec. Cariu	Oman
4	Poktan Gobang Jaya	Desa Tugujaya Kec. Cigombong	W. Yasa

c) Penerima Bantuan Bangunan dan Mesin Pengering Gabah (Bed Dryer)

No	Nama Kelompok	Alamat	Nama Ketua
1	Gapoktan Asmara Jaya	Desa Ciasmara Kec. Pamijahan	Maji S

○ **Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)**



Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Bogor Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan angka tetap tahun 2024 sebagai dasar perhitungan. Pemilihan angka tetap ini dimaksudkan agar hasil analisis yang diperoleh lebih akurat dan stabil, mencerminkan kondisi riil ketersediaan pangan pada tahun sebelumnya, serta dapat digunakan sebagai acuan yang konsisten untuk perencanaan dan proyeksi kebutuhan pangan tahun berjalan. Penggunaan data angka tetap juga membantu menjaga kesinambungan antarperiode dalam sistem pemantauan dan evaluasi pangan daerah.

Penyusunan dokumen Neraca Bahan Makanan ini bertujuan untuk menyediakan data, informasi, dan analisis yang akurat mengenai situasi penyediaan/pengadaan dan penggunaan pangan serta ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk serta kualitas keberagaman ketersediaan pangan

Neraca Bahan Makanan ini diharapkan mampu:

1. Menyediakan bahan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan daerah yang berorientasi pada kemandirian dan kedaulatan pangan.
2. Mendukung penyusunan dokumen perencanaan daerah yang berkaitan dengan ketahanan pangan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta laporan capaian indikator kinerja pembangunan pangan.

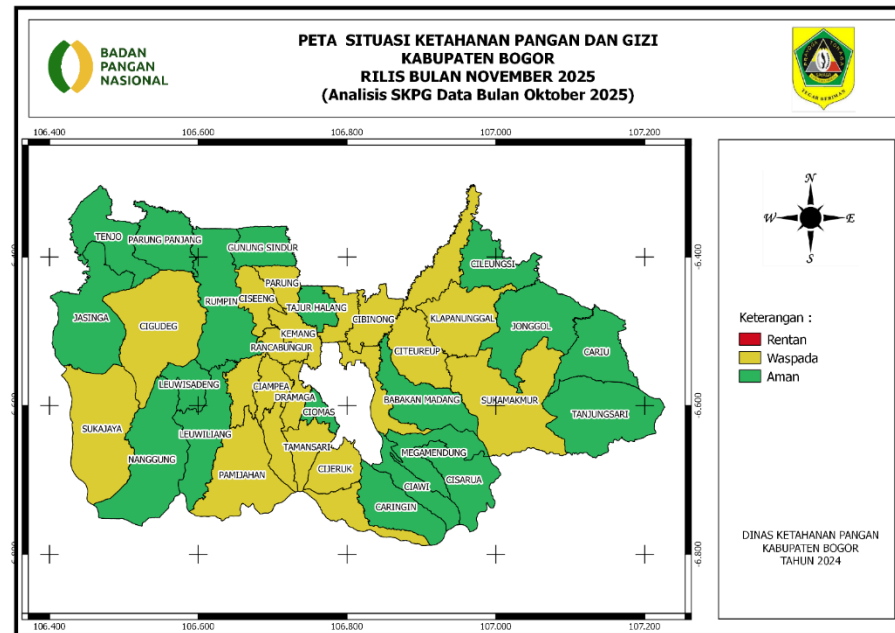
Hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Bogor Tahun 2025:

1. Ketersediaan energi masyarakat menunjukkan tren peningkatan dengan capaian 2.478 kkal/kapita/hari pada tahun 2025 atau 103,25% dari rekomendasi WNPG X 2012. Ketersediaan energi masih didominasi oleh kelompok padi-padian (52,6%), terutama beras, sehingga diversifikasi sumber karbohidrat masih perlu ditingkatkan.
2. Ketersediaan protein pada tahun 2025 mencapai 84,87 gram/kapita/hari atau 134,71% dari rekomendasi WNPG X 2012. Kontribusi protein cenderung bergeser dari dominasi padi-padian menuju protein nabati terutama kacang-kacangan (kedelai). Sementara itu, ketersediaan protein dari ikan mengalami penurunan cukup signifikan dan perlu mendapat perhatian untuk menghindari ketidakseimbangan konsumsi protein hewani.
3. Ketersediaan lemak menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 61,12 gram/kapita/hari pada 2025 atau 91,63% dari rekomendasi WNPG 2012. Minyak goreng sawit menjadi kontributor terbesar lemak disusul daging dan telur. Ketergantungan pada minyak nabati masih cukup tinggi sehingga promosi konsumsi lemak sehat perlu diperkuat.
4. Skor PPH Kabupaten Bogor tahun 2025 telah berada pada kategori tinggi (88,25), menandakan ketersediaan pangan beragam dan cukup memenuhi kebutuhan gizi, namun masih terdapat ketidakseimbangan antar kelompok pangan. Gap sebesar 11,75 poin menuju skor ideal terutama disebabkan oleh rendahnya ketersediaan kelompok umbi-umbian, sayuran-buah, gula, dan biji berminyak.



- **Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota Tahun 2025**

Untuk mewujudkan pengelolaan program ketahanan pangan yang efektif, diperlukan informasi ketahanan pangan yang akurat dan tertata dengan baik, sehingga dapat dilakukan intervensi efektif secara anggaran maupun program yang dilakukan. Pentingnya mengetahui kondisi pangan dan gizi di suatu daerah, menjadikan pemantauannya menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah melalui analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG).



Food waste saat ini menjadi isu yang penting dan telah menjadi perhatian secara global. Sisa makanan ini merupakan salah satu yang menjadi permasalahan ekonomi dan lingkungan paling menantang di abad ke-21. Selain itu penanganan food waste merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sebagai SDGS, khususnya poin 12.3 yakni : di tahun 2030 “berkurangnya sebanyak 50% food waste per kapita di tingkat ritel dan konsumen. Di Kabupaten Bogor sendiri, sampah rumah tangga pangan / food waste di kabupaten bogor yaitu sebanyak 77 kg/kap/tahun setara dengan 428.802 ton/tahun atau 1,17 juta kg/hari. Hal ini merupakan tugas kita semua dalam menangani food waste khususnya di Kabupaten Bogor. Mengingat urgensi kegiatan ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor melaksanakan Kegiatan “PENANGANAN SISA SUSUT PANGAN TAHUN 2025”

Penanganan food waste sendiri jika dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan akan mendorong pencapaian beberapa point SDGS dengan strategi sebagai berikut :

- Pengembangan Kebijakan dan Regulasi
- Peningkatan Kapasitas dan Edukasi
- Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama

#### **Hasil Kegiatan**

##### **Pengembangan Kebijakan dan Regulasi**

- Usulan Draft Perbup penanganan daerah rentan rawan pangan yang didalamnya termasuk penanganan sisa dan susut pangan.
- Upaya integrasi isu sisa dan susut pangan Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Bogor.

##### **Peningkatan Kapasitas dan Edukasi**

- **Kampanye dan Gerakan Penyelamatan Pangan melalui kegiatan Babagi Sayuran (BAGAS):**



BAGAS (Babagi Sayuran) adalah kampanye edukasi ke masyarakat tentang urgensi dan bagaimana penanganan sisa dan susut pangan di komoditas sayur dan buah (*ugly food / imperfect product*) sekaligus aksi penyelamatan pangan di sector pertanian. Dalam kegiatan ini DKP bekerjasama dengan petani lokal untuk menyerap produk pertanian dari petani lokal disaat harga jual turun dan menyerap sayur dan buah yang tidak laku dipasar karena bentuk tidak menarik (*ugly food*) sehingga menurunkan angka sisa dan susut pangan. Pada tahun ini BAGAS berhasil menyelamatkan 1.450 Kg sayur dan buah.

- **Sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat**

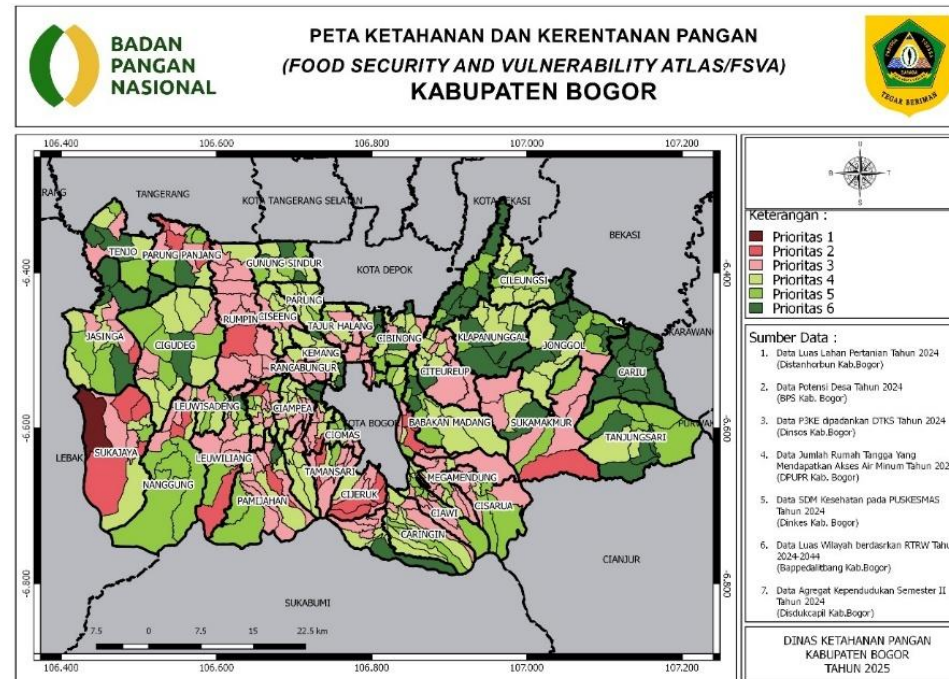


Hotel restoran anggota PHRI Kabupaten Bogor

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas sektor swasta terkait penanganan food waste sehingga mampu mencegah jumlah food waste yang dihasilkan di sektor swasta. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah untuk membangun kerjasama yang sinergis di horeka dalam mewujudkan sistem pangan berkelanjutan. Selain DKP juga menyerahkan banner Gerakan Selamatkan Pangan kepada Horeka dalam rangka pemasifan isu Pemantauan pemasangan banner Gerakan Selamatkan Pangan yang telah di serahkan merupakan bentuk pengukuran komitmen Horeka dalam pelaksanaan penanganan sisa dan susut pangan di instansi masing-masing. Berdasarkan evaluasi >70% Horeka yang memasang banner yang telah diserahkan.

○ **Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan**

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah.



Hasil Analisis Komposit FSVA diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan wilayah, yaitu: Prioritas 1 (sangat rentan); Prioritas 2 (rentan); Prioritas 3 (agak rentan); Prioritas 4 (agak tahan); Prioritas 5 (tahan); dan Prioritas 6 (sangat tahan). Hasil Analisis FSVA Kabupaten Bogor secara komposit tahun 2025 metode lama adalah sebagai berikut:

- Hasil analisis FSVA tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total 435 desa/kelurahan di Kabupaten Bogor, sebanyak 160 desa/kelurahan termasuk wilayah rentan pangan (Prioritas 1-3) dengan rincian sebanyak 1 desa yang termasuk Prioritas 1 (0,23%), 24 desa/kelurahan (5,52%) termasuk Prioritas 2, 135 desa/kelurahan (31,03%) termasuk Prioritas 3.
- Untuk sisanya sebanyak 275 desa/kelurahan (63,22%) termasuk wilayah tahan pangan dengan rincian 138 desa/kelurahan (31,72%) termasuk Prioritas 4, sebanyak 75 desa/kelurahan (17,24%) termasuk Prioritas 5, dan sebanyak 62 desa/kelurahan (14,25%) termasuk dalam Prioritas 6.
- Terdapat 15 kecamatan yang harus diberikan perhatian lebih karena lebih dari atau sama dengan 50% desa/kelurahan yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan tersebut termasuk rentan rawan pangan (prioritas 1 – 3), yaitu Cijeruk, Cisarua, Dramaga, Leuwiliang, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung Panjang, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Sukaraja, Tajurhalang, dan Tamansari.

- Perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 435 desa/kelurahan antara tahun 2024 – 2025. Berdasarkan hasil analisis komposit, jumlah desa/kelurahan yang termasuk kategori rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami penurunan dari 168 desa/kelurahan di FSVA tahun 2024 menjadi 160 desa/kelurahan di FSVA tahun 2025.

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi**

Salah satu fokus pembangunan ketahanan pangan pada saat ini diarahkan pada penanganan masalah kerawanan pangan dan kemiskinan. Untuk itu upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi di satu daerah, sangat penting guna mengetahui mengenai siapa, berapa banyak yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi serta dimana mereka tinggal lalu apa saja sebenarnya yang membuat mereka rentan. Kerawanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter yang berbeda yang berada di luar cakupan masalah produksi pangan semata, dengan tidak ada satu ukuran yang langsung dapat mengukur masalah ini.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pemantapan dan pemberian pendampingan, pemberian bantuan serta pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan. Strategi yang dilakukan dalam rangka penanganan rawan pangan di Kabupaten Bogor, khususnya oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah dengan melakukan dengan penyaluran bantuan sembako bagi warga yang terindikasi rawan pangan pasca bencana dan terindikasi rawan pangan. Masyarakat Kabupaten Bogor yang terindikasi kemungkinan mengalami rawan pangan.

**Pelaksanaan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)**

Berkaitan dengan hal di atas pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat yaitu 1300 KK sebanyak 1300 paket yang dilakukan menjadi 4 tahap dengan rincian sebagai berikut:

1. abon sapi 1300 pack,
2. kornet sapi 1300 kaleng,
3. minyak goreng 1000 buah,
4. sarden 1300 kaleng, dan
5. tepung terigu 1300 bungkus.
6. Daging Ayam 1300 bungkus
7. Susu UHT 6000 pack
8. Biskuit 900 pack
9. Beras terfortifikasi 900 Kg

Penyaluran bantuan pangan tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 4 tahap. Rekapitulasi penyaluran bantuan pangan pada tahun 2025 dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 1 Rekapitulasi penyaluran bantuan PDRP Tahun 2025

Hari,Tanggal	Kecamatan	Desa	Jumlah Per Kec
Tahap 1			
Selasa, 11 Maret 2025	Ciampea	Cicadas	5
		Bojongrangkas	
	Cigudeg	Mekarjaya	10
		Cigudeg	
	Nanggung	Kalongliud	22
		Cisarua	
		Parakanmuncang	
	Cibungbulang	Nanggung	139
		Ciaruteun Udik	
		Ciaruteun Ilir	
Rabu, 12 Maret 2025	Tajurhalang	Cijujung	3
		Tonjong	
		Kalisuren	
	Bojonggede	Pabuaran	23
	Cibinong	Cibinong	39
		Pakansari	
		Nanggewer	
		Pabuaran	
Kamis, 13 Maret 2025	Cairingin	Karadenan	23
		Lemahduhur	
		Pasir Buncir	
		Cimande	
		Cinagara	
		Tangkil	
		Caringin	
	Cijeruk	Pasir Muncang	18
		Cijeruk	
		Cipicung	
		Tajurhalang	
		Cipelang	
	Cigombong	Warung Menteng	21
		Palasari	
	Cigombong	Ciburayut	21

Hari,Tanggal	Kecamatan	Desa	Jumlah Per Kec
		Cigombong	
		Watesjaya	
Selasa, 18 Maret 2025	Kemang	Pondok Udik	2
		Pabuaran	
	Megamendung	Sukamahi	25
		Sukaesmi	
		Cipayung	
		Sukamanah	
Rabu, 19 Maret 2025	Sukamakmur	Sukamakmur	61
		Pabuaran	
		Sukamulya	
		Sirnajaya	
		Wargajaya	
		Sukawangi	
		Sukaharja	
	Jonggol	Cibodas	3
		Singajaya	
Total tahap 1			394
Tahap 2			
Selasa, 10 Juni 2025	Caringin	Cimande Hilir	38
		Cinagara	
		Pancawati	
		Ciderum	
	Ciomas	Sukamakmur	29
		Kota Batu	
		Sukaharja	
Jumat, 13 Juni 2025	Ciampea	Tegalwaru	79
		Cinangka	
		Cibanteng	
Kamis, 19 Juni 2025	Sukamakmur	Sukamakmur	157
		Pabuaran	
		Sukamulya	
		Sirnajaya	
		Wargajaya	
		Sukawangi	



Hari,Tanggal	Kecamatan	Desa	Jumlah Per Kec
		Sukaharja	
		Cibadak	
Total tahap 2			303
Tahap 3			
Selasa, 16 September 2025	Megamendung	Gadog	192
		Pasir Angin	
		Cipayung Girang	
		Cipayung	
		Kuta	
		Megamendung	
		Sukagalih	
		Sukakarya	
Sukamaju			
Kamis, 18 September 2025	Rumpin	Sukasari	42
		Gobang	
		Cipinang	
	Kemang	Pondok Udik	66
		Pabuaran	
		Tegal	
		Semplak Barat	
		Kemang	
		Bojong	
Total tahap 3			300
Tahap 4			
Senin, 8 Desember 2025	Babakan Madang	Sentul	92
		Kadumangu	
		Cijayanti	
		Bojong Koneng	
Selasa, 9 Desember 2025	Ciomas	Laladon	211
		Sukamakmur	
		Sukaharja	
		Ciapus	
Total tahap 4			303
Total Tahun 2025			1300

### 3. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal. Sebagai pelaksanaan dari fungsi tersebut bidang Konsumsi dan Penganekaragaman pangan melaksanakan kegiatan :

➤ **Kelompok Substansi Konsumsi Pangan**

○ **Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**



Pangan lokal merupakan salah satu kekuatan strategis dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor memiliki keragaman potensi komoditas unggulan, khususnya pada kelompok pangan umbi-umbian yang tersebar di 40 kecamatan. Namun demikian, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam bentuk produk olahan bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar.

Pelaku usaha pangan lokal, khususnya UMKM dan Kelompok Wanita Tani (KWT), masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pengetahuan, keterampilan teknis, manajemen usaha, serta akses terhadap teknologi pengolahan dan pemasaran produk. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor pada tahun 2025 melaksanakan sub kegiatan pengembangan pangan lokal yang berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha dan penguatan pemanfaatan pangan lokal non beras.

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yaitu **Demo Olahan Pangan Lokal** dan **Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pangan Lokal**, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha, mendorong pemanfaatan optimal sumber daya pangan lokal, mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan berbasis pangan lokal.

Kegiatan **Demo Olahan Pangan Lokal** dilaksanakan sebanyak **18 kali** sepanjang tahun 2025 dengan melibatkan peserta sebanyak **30–40 orang per kegiatan** yang berasal dari unsur TP PKK Desa dan Kelurahan, kelompok berdikari, UMKM pangan lokal, kader posyandu, dan kader ketahanan pangan. Kegiatan ini tersebar di berbagai kecamatan dan kelurahan, serta dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan strategis daerah, antara lain Launching Gerakan SEHAT, Festival Pangan Lokal Bogorfest, Lomba Cipta Menu B2SA tingkat kabupaten, kunjungan kerja Bupati, perayaan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta peringatan Hari Pangan Sedunia tingkat Kabupaten Bogor.

Selain itu, **Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pangan Lokal** dilaksanakan pada tanggal **8–12 September 2025** bertempat di Rumah Pangan Lokal Indonesia (RPLI), Kecamatan Sukaraja. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha pangan lokal yang tergabung dalam RPLI, Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Dapur Shakeel, dan Warung Terpuji.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini memberikan pembekalan pengetahuan dan pelatihan teknis terkait pengolahan pangan lokal yang inovatif, serta penguatan wawasan manajemen usaha, strategi pemasaran, pengemasan produk, dan pengembangan jejaring usaha guna memperluas akses pasar.

### Hasil dan Capaian Kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan pengembangan pangan lokal tahun 2025 memberikan dampak positif bagi peserta dan pelaku usaha, yang ditunjukkan melalui:

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengolah pangan lokal non beras menjadi produk olahan bernilai tambah.
2. Meningkatnya kapasitas manajemen usaha pelaku usaha pangan lokal, mencakup pengelolaan usaha, pemasaran, dan pengemasan produk.
3. Terbangunnya jejaring dan kemitraan antar pelaku usaha, komunitas pangan lokal, serta pemangku kepentingan terkait.
4. Meningkatnya motivasi dan kepercayaan diri pelaku usaha untuk mengembangkan usaha pangan lokal secara berkelanjutan.
5. Tersusunnya dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program di tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, sub kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas pangan lokal tahun 2025 berkontribusi nyata dalam memperkuat pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif non beras, mendorong tumbuhnya UMKM pangan lokal yang inovatif dan berdaya saing, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Bogor yang berkelanjutan.

#### o Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Kabupaten Bogor memiliki potensi pangan lokal yang sangat beragam, meliputi kelompok pangan umbi-umbian, buah dan sayur, serta produk hasil peternakan dan perikanan. Potensi tersebut tersebar merata di berbagai wilayah dan menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Namun demikian, pemanfaatan potensi pangan lokal tersebut belum optimal, salah satunya disebabkan oleh belum tersedianya dokumen perencanaan yang secara sistematis memetakan kebutuhan, ketersediaan, serta peluang pengembangan pangan lokal di Kabupaten Bogor.



Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal menjadi langkah strategis untuk mendukung kebijakan diversifikasi pangan, khususnya dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas pangan tertentu seperti beras dan terigu. Dokumen perencanaan ini diharapkan menjadi fondasi dalam memperkuat kemandirian pangan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi pangan lokal yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor pada tahun 2025 melaksanakan sub kegiatan yang difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pangan lokal serta promosi produk olahan pangan lokal non beras dan non terigu. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yaitu Sosialisasi Pangan Lokal dan Pembelian Produk Olahan Pangan Lokal untuk Kebutuhan Promosi.

Kegiatan Sosialisasi Pangan Lokal dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 bertempat di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan dihadiri oleh 300 peserta yang terdiri dari TP PKK Kabupaten Bogor, TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Bogor, kader ketahanan pangan, serta

pemangku kepentingan terkait. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk talkshow dan demo olahan pangan lokal dengan menghadirkan narasumber dari tingkat nasional dan daerah, yaitu Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, akademisi vokasi IPB, serta praktisi kuliner nasional. Selain sosialisasi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor juga melaksanakan pembelian produk olahan pangan lokal non beras dan non terigu sebanyak 180 produk. Produk tersebut dimanfaatkan sebagai sarana promosi pada kegiatan berskala lokal dan nasional, antara lain kegiatan APKASI Tahun 2025 dan peringatan Hari Pangan Sedunia tingkat Kabupaten Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaku UMKM pangan lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner berbasis pangan lokal Kabupaten Bogor kepada masyarakat yang lebih luas.

### **Hasil dan Capaian Kegiatan**

Pelaksanaan sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan sosialisasi pangan lokal tahun 2025 menghasilkan beberapa capaian penting, antara lain:

- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai potensi dan manfaat pangan lokal.
- Terlaksananya edukasi diversifikasi konsumsi pangan, khususnya pangan lokal non beras dan non terigu.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan pangan lokal.
- Terjalinnnya komunikasi dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
- Meningkatnya komitmen bersama dalam mendukung pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.

Secara keseluruhan, sub kegiatan ini berperan penting dalam menyediakan landasan awal bagi perumusan kebijakan dan program ketahanan pangan daerah berbasis pangan lokal. Melalui peningkatan kesadaran, promosi produk lokal, serta penguatan komitmen pemangku kepentingan, Kabupaten Bogor diharapkan mampu mewujudkan sistem pangan daerah yang lebih mandiri, beragam, dan berkelanjutan

#### ○ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun**

Konsumsi pangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi konsumsi pangan umumnya dianalisis melalui kecukupan konsumsi energi dan protein sebagai zat gizi makro utama. Kedua indikator ini digunakan secara nasional, termasuk oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai dasar pengukuran kondisi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain kuantitas konsumsi, kualitas konsumsi pangan masyarakat juga menjadi perhatian penting. Kualitas konsumsi pangan diukur melalui Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan konsumsi pangan yang mencerminkan keberagaman dan keseimbangan asupan energi dari berbagai kelompok pangan. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan pola konsumsi yang semakin beragam, bergizi seimbang, dan terdiversifikasi, dengan skor ideal sebesar 100.

Berbagai faktor memengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat, antara lain tingkat pendapatan, selera konsumen, harga pangan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, serta lingkungan dan kebiasaan setempat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan memerlukan intervensi yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi, melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kapita/hari, serta peningkatan skor PPH ideal di Kabupaten Bogor.

## Pelaksanaan Kegiatan



Pelaksanaan sub kegiatan dilakukan melalui beberapa bentuk intervensi utama, yaitu edukasi, sosialisasi, advokasi, pembinaan, serta penyusunan dokumen analisis berbasis data. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

### 1. **Pembinaan dan Bimbingan Teknis Kader Ketahanan Pangan**

Kabupaten Bogor memiliki 80 Kader Ketahanan Pangan yang tersebar di 40 kecamatan. Pada tahun 2025 dilaksanakan Bimbingan Teknis Kader Ketahanan Pangan pada tanggal 5–6 Februari 2025, serta evaluasi kinerja kader pada tanggal 26 November 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kader agar mampu berperan aktif dalam sosialisasi program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan serta mendorong penerapan pola konsumsi pangan B2SA di masyarakat.

### 2. **B2SA Goes To School**

Kegiatan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dilaksanakan sebanyak 21 kali di tingkat sekolah dasar dan menengah dengan jumlah peserta sekitar 200 siswa di setiap lokasi. Penyampaian materi dilakukan secara edukatif dan interaktif melalui metode dongeng, permainan, dan diskusi. Kegiatan ini bertujuan menanamkan pemahaman pola konsumsi sehat sejak dini serta mendukung pencegahan masalah gizi, termasuk stunting.

### 3. **Sosialisasi dan Demo Menu B2SA**

Sosialisasi dan demo menu B2SA dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan melibatkan TP PKK Kecamatan dan Desa, UMKM, serta kader posyandu. Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengolahan pangan berbasis pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan peluang ekonomi masyarakat.

### 4. **Penyusunan Dokumen Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)**

Penyusunan dokumen analisis PPH konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor dilaksanakan pada bulan Agustus–September 2025 dengan pendampingan akademisi IPB. Analisis dilakukan berdasarkan data Susenas Tahun 2024 untuk menggambarkan situasi konsumsi pangan masyarakat serta estimasi pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan penduduk dan wilayah Kabupaten Bogor.

## Hasil dan Capaian Kegiatan

Hasil analisis PPH menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bogor masih belum optimal dan cenderung didominasi oleh kelompok padi-padian. Beberapa kelompok pangan, seperti umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, buah, dan sayur, masih berada di bawah kebutuhan ideal. Temuan ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan program perbaikan pola konsumsi pangan di Kabupaten Bogor.



➤ **Kelompok Substansi Penganekaragaman dan Promosi Pangan**

○ **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**

1. Fasilitasi dan Edukasi Taman B2SA Masyarakat.

Pada Fasilitasi dan Edukasi Taman B2SA untuk masyarakat, berupa bantuan Fasilitas yang diserahkan kepada masyarakat terdiri dari 38 Masyarakat di berbagai kecamatan dan 2 Lomba Sektoral. Pemberian Bantuan Taman B2SA berupa Benih- benih tanaman, Sarana pertanian dan Paket Ayam Petelur (Kandang, Ayam dan Pakan) . Bantuan ini diberikan pada Kelompok Berdikari/kelompok tani/kelompok wanita tani.

2. Edukasi Urban Farming di Taman B2SA

Dilaksanakan untuk 200 peserta. Kegiatan berupa edukasi pertanian pada lahan terbatas atau lahan pekarangan kepada anak-anak sekolah dan masyarakat. Dimana peserta akan disajikan materi terkait dan praktik. Peserta meliputi anak sekolah dan Masyarakat. Dengan pelaksanaan 20 orang per pertemuan. Narasumber terdiri dari Tim Promosi dan penganekaragaman pangan.

3. Fasilitasi Taman Percontohan.

Fasilitasi kebutuhan untuk Taman B2SA percontohan di DKP. Meliputi ketersediaan benih, sarana prasarana pertanian dan peternakan. Untuk menunjang keberlangsungan Taman B2SA Percontohan.



**1. Pelaksanaan Kegiatan**

1. Edukasi dan Fasilitasi Taman B2SA

a. Eduksi Taman B2SA

Kegiatan edukasi yang diberikan untuk kelompok penerima manfaat terdiri dari 3 pertemuan dengan materi diantaranya:

- Edukasi 1 (Persiapan Taman B2SA) Materi: Budidaya Sayur, Buah, dan Ternak, Narasumber: praktisi / penyuluh tani dan ternak
- Edukasi 2 (Pelaksanaan Taman B2SA) Materi: Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman, Pembuatan Pestisida dan Pupuk Organik, Narasumber: praktisi / penyuluh tani
- Edukasi 3 (Evaluasi Taman B2SA) Materi: Pengolahan Pangan Hasil Taman B2SA dan Berbagi Pengalaman Kelompok Berdikari Tahun sebelumnya, Narasumber: praktisi dan kelompok berdikari



b. Fasilitas Taman B2SA.

Dalam melaksanakan kegiatan Edukasi dan Fasilitas Taman B2SA, sejumlah paket bantuan diberikan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan sayur dan buah serta pangan hewani rumah tangga. Daftar Fasilitas yang dibagikan berupa :

Tabel 3. Daftar bantuan yang diberikan untuk kelompok penerima manfaat Edukasi dan Fasilitas Taman B2SA.

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	JUMLAH	SATUAN
1	Benih Bayam	Kemasan 500 gram	5	Pack
2	Benih cabai keriting	Kemasan 10 gram	3	Pack
3	Benih cabai rawit	Jenis hibrida	3	Pack
4	Benih kangkong	Kemasan 1000 gram	5	Pack
5	Benih mentimun	Kemasan 20 gram	5	Pack
6	Benih tomat	Hibrida, kemasan 10 gram	3	Pack
7	Kapur Dolomite	Kemasan 1 kg	50	Kg
8	Emrat	Bahan plastik, ukuran 8 liter	2	Buah
9	Garpu tanah	Bahan besi 4 mata	1	Buah
10	Hand sprayer	Manual, kapasitas 14 liter	1	Unit
11	Kored	Bahan baja, gagang terbuat dari kayu	2	Buah
12	Media tanam	Komposisi tanah, kompos organik, pupuk kandang	250	Kg
13	Paranet	Intensitas cahaya 85%, lebar 3 meter	40	Meter
14	Polybag	Ukuran 10 x 10 cm	5	Kg
15	Polybag	Ukuran 30 x 30 cm	10	Kg
16	Benih kelor	Isi 20 butir	1	Sachet
17	Pupuk kandang	Kemasan 1 kg	500	Kg
18	Pacul	Bahan besi, gagang terbuat dari kayu	1	Buah
19	Bibit jambu kristal	Tinggi 50 cm	4	Pohon
20	Ayam petelur	Usia minimal 14 minggu	12	Ekor
21	Pakan ayam	Petelur masa produksi, isi 50 kg	4	Zak
22	Egg stimulant	Vitamin ayam petelur	1	Dus
23	Kandang ayam	Petelur, panjang 120 cm, lebar 55 cm, tinggi 30 cm	1	Unir

## 2. Edukasi Urban Farming

Kegiatan Edukasi Taman B2SA di percontohan DKP dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kelas dengan peserta sebanyak 20 orang per kelas. Peserta edukasi adalah masyarakat Kabupaten Bogor mulai dari pelajar, kelompok masyarakat, kelompok bertani/berkebun, staf instansi, atau kelompok PKK. Edukasi dilaksanakan di Saung Pasamoan dan lahan pertanian di Taman B2SA Percontohan yang terdapat di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Kegiatan edukasi dengan konsep urban farming menjadi tepat karena sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor adalah perkotaan (88%), sehingga edukasi terkait budidaya pangan di lahan terbatas / pekarangan sangat sesuai. Edukasi dilaksanakan dengan menjelaskan sejumlah materi dan praktik mulai dari budidaya untuk menghasilkan pangan hingga pengolahan/pemanfaatan pangan dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dalam segi ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi/pemanfaatan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman. Hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan dalam pemenuhan Sumber Daya Manusia Indonesia khususnya Kabupaten Bogor yang berkualitas/ sehat, aktif, produkti, dan adaptif.

Kegiatan Edukasi Taman B2SA di percontohan DKP dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kelas dengan peserta sebanyak 20 orang per kelas. Peserta edukasi adalah masyarakat Kabupaten Bogor mulai dari pelajar, kelompok masyarakat, kelompok bertani/berkebun, staf instansi, atau kelompok PKK. Edukasi dilaksanakan di Saung Pasamoan dan lahan pertanian di Taman B2SA Percontohan yang terdapat di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan

### ❖ Edukasi dan Fasilitasi Taman B2SA

#### Eduksi Taman B2SA

Kegiatan edukasi yang diberikan untuk kelompok penerima manfaat terdiri dari 3 pertemuan dengan materi diantaranya:

- Edukasi 1 (Persiapan Taman B2SA) Materi: Budidaya Sayur, Buah, dan Ternak, Narasumber: praktisi / penyuluh tani dan ternak
- Edukasi 2 (Pelaksanaan Taman B2SA) Materi: Penanganan Hama dan Penyakit Tanaman, Pembuatan Pestisida dan Pupuk Organik, Narasumber: praktisi / penyuluh tani
- Edukasi 3 (Evaluasi Taman B2SA) Materi: Pengolahan Pangan Hasil Taman B2SA dan Berbagi Pengalaman Kelompok Berdikari Tahun sebelumnya, Narasumber: praktisi dan kelompok berdikari

### ❖ Fasilitasi Taman B2SA.

Dalam melaksanakan kegiatan Edukasi dan Fasilitasi Taman B2SA, sejumlah paket bantuan diberikan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan sayur dan buah serta pangan hewani rumah tangga. Daftar Fasilitas yang dibagikan berupa :

Tabel 3. Daftar bantuan yang diberikan untuk kelompok penerima manfaat Edukasi dan Fasilitasi Taman B2SA.

No	URAIAN	SPESIFIKASI	JUMLAH	SATUAN
1	Benih Bayam	Kemasan 500 gram	5	Pack
2	Benih cabai keriting	Kemasan 10 gram	3	Pack
3	Benih cabai rawit	Jenis hibrida	3	Pack
4	Benih kangkong	Kemasan 1000 gram	5	Pack
5	Benih mentimun	Kemasan 20 gram	5	Pack
6	Benih tomat	Hibrida, kemasan 10 gram	3	Pack
7	Kapur Dolomite	Kemasan 1 kg	50	Kg
8	Emrat	Bahan plastik, ukuran 8 liter	2	Buah
9	Garpu tanah	Bahan besi 4 mata	1	Buah
10	Hand sprayer	Manual, kapasitas 14 liter	1	Unit
11	Kored	Bahan baja, gagang terbuat dari kayu	2	Buah
12	Media tanam	Komposisi tanah, kompos organik, pupuk kandang	250	Kg
13	Paranet	Intensitas cahaya 85%, lebar 3 meter	40	Meter
14	Polybag	Ukuran 10 x 10 cm	5	Kg
15	Polybag	Ukuran 30 x 30 cm	10	Kg
16	Benih kelor	Isi 20 butir	1	Sachet
17	Pupuk kandang	Kemasan 1 kg	500	Kg
18	Pacul	Bahan besi, gagang terbuat dari kayu	1	Buah
19	Bibit jambu kristal	Tinggi 50 cm	4	Pohon
20	Ayam petelur	Usia minimal 14 minggu	12	Ekor
21	Pakan ayam	Petelur masa produksi, isi 50 kg	4	Zak
22	Egg stimulant	Vitamin ayam petelur	1	Dus
23	Kandang ayam	Petelur, panjang 120 cm, lebar 55 cm, tinggi 30 cm	1	Unit

#### ❖ Edukasi Urban Farming

Kegiatan Edukasi Taman B2SA di percontohan DKP dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kelas dengan peserta sebanyak 20 orang per kelas. Peserta edukasi adalah masyarakat Kabupaten Bogor mulai dari pelajar, kelompok masyarakat, kelompok bertani/berkebun, staf instansi, atau kelompok PKK. Edukasi dilaksanakan di Saung Pasamoan dan lahan pertanian di Taman B2SA Percontohan yang terdapat di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Kegiatan edukasi dengan konsep urban farming menjadi tepat karena sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor adalah perkotaan (88%), sehingga edukasi terkait budidaya pangan di lahan terbatas / pekarangan sangat sesuai. Edukasi dilaksanakan dengan menjelaskan sejumlah materi dan praktik mulai dari budidaya untuk menghasilkan pangan hingga pengolahan/pemanfaatan pangan dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dalam segi ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi/pemanfaatan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman. Hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan dalam pemenuhan Sumber Daya Manusia Indonesia khususnya Kabupaten Bogor yang berkualitas/ sehat, aktif, produkti, dan adaptif. Kegiatan Edukasi Taman B2SA di percontohan DKP dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kelas dengan peserta sebanyak 20 orang per kelas. Peserta edukasi adalah masyarakat Kabupaten Bogor mulai dari pelajar, kelompok masyarakat, kelompok bertani/berkebun, staf instansi, atau kelompok PKK. Edukasi dilaksanakan di Saung Pasamoan dan lahan pertanian di Taman B2SA Percontohan yang terdapat di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.

#### 4. Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan membawahi seksi Pengawasan Keamanan Pangan dan Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan salah satunya memiliki fungsi penyelenggaraan fasilitasi keamanan pangan. Sebagai pelaksanaan dari fungsi tersebut bidang keamanan pangan melaksanakan kegiatan :

##### ➤ **Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan Pangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pasal 68 UU tersebut menugaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan secara terpadu di seluruh rantai pangan.

Sebagai bentuk implementasi amanat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor melalui Bidang Keamanan Pangan melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) pada tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin keamanan pangan dari tingkat produksi, distribusi, hingga konsumsi, serta meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan dilaksanakan melalui dua sub kegiatan utama, yaitu Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

##### ○ **Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan**

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui sembilan program kegiatan yang mencakup pengawasan, peningkatan kapasitas, sosialisasi, serta koordinasi lintas sektor. Salah satu kegiatan utama adalah Pengawasan Mandiri Keamanan Pangan Metode Internal Control System (ICS) yang dilaksanakan di Pasar Cisarua, Pasar Nanggung, dan Pasar Jasinga. Pengawasan dilakukan oleh tim ICS yang dibentuk di masing-masing pasar untuk melakukan pendataan, sosialisasi, pengawasan sanitasi dan higiene, serta pengujian cepat (rapid test) pangan segar secara rutin dan berkelanjutan.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor mencanangkan Gerakan Makan Pangan Segar Berizin Edar dan Aman (GEMPAR BERIMAN) dalam rangka Hari Keamanan Pangan Sedunia 2025 dan Hari Jadi Bogor ke-543. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk talkshow dengan menghadirkan narasumber dari Badan

Pangan Nasional, ahli keamanan pangan, dan konsultan gizi, serta diikuti oleh 220 peserta dari unsur SKPD, pelaku usaha, pengelola pasar, kader ketahanan pangan, dan manajemen ritel modern.

Upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha juga dilakukan melalui Peningkatan Pengetahuan Standar Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil/Mikro yang dilaksanakan di enam Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dengan total peserta sebanyak 120 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait penerapan standar keamanan pangan sejak budidaya hingga pascapanen, termasuk pengemasan dan distribusi.

Penguatan keamanan pangan di tingkat distribusi dilakukan melalui peningkatan pengetahuan pengelola pasar rakyat, pengawasan rutin di sepuluh pasar rakyat, serta pengawasan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Pengawasan juga dilaksanakan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan secara kasuistik, termasuk validasi dan pengawasan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis.

Di tingkat produksi, pengawasan keamanan pangan dilakukan terhadap lima pelaku usaha pemegang izin edar logo putih sebagai bagian dari proses pembinaan menuju logo hijau. Selain itu, dilaksanakan satu kali Rapat Koordinasi Tim Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan (JKMP) Kabupaten Bogor untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan mempersiapkan transformasi kelembagaan menjadi Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) pada tahun 2026.

Sebagai keluaran sub kegiatan ini, telah disusun lima dokumen rekomendasi hasil pengawasan keamanan pangan yang ditujukan kepada perangkat daerah dan instansi terkait, meliputi aspek peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan lingkungan pasar, kesehatan, keselamatan kerja, serta dukungan sarana pengujian pangan.



➤ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan**



penunjang keamanan pangan berupa box kontainer sayur dan gerobak dorong kepada 10 kelompok tani penerima manfaat. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung penerapan Good Agricultural Practices (GAP) sebagai persyaratan awal sertifikasi Prima 3. Penerima bantuan alat penunjang keamanan pangan berjumlah 10 kelompok tani yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor: 500.1.4.3/5361-KP tentang Penetapan Penerima Bantuan Alat Penunjang Keamanan Pangan Tahun Anggaran 2025 yakni :

Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui empat program utama. Lomba Pasar Pangan Aman melibatkan 22 pasar rakyat yang dikelola oleh Perumda Pasar Tohaga. Penilaian dilakukan secara bertahap oleh tim lintas sektor, dan menghasilkan Pasar Cisarua sebagai pemenang kelas I, Pasar Cariu sebagai pemenang kelas II, dan Pasar Nanggung sebagai pemenang kelas III.

Peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha juga dilakukan melalui Peningkatan Pengetahuan Sertifikasi Prima 3 yang dilaksanakan di lima BPP dengan total peserta 100 orang. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pendampingan dan pengawasan terhadap 16 kelompok tani dan pelaku usaha untuk mendorong penerbitan sertifikasi Prima 3.

Sebagai bentuk dukungan sarana prasarana, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan alat

No.	Nama Kelompok Tani	Alamat		Ketua Kelompok
		Desa	Kecamatan	
1.	Kelompok Tani Annur	Babakan	Ciseeng	Feri Firdaus
2.	Kelompok Tani Berkah Tani Jaya	Citeko	Cisarua	Dede Purwana
3.	Kelompok Tani Bumi Cianten Endah	Purwabakti	Pamijahan	Ujang Yusup
4.	Kelompok Tani Dapur Tani	Purwabakti	Pamijahan	Aang
5.	Kelompok Tani Maju Jaya Algozali	Hambalang	Citeureup	Retno Khoeri
6.	Kelompok Tani Manggis	Karyasari	Leuwiliang	Junaedi Abdullah
7.	Kelompok Tani Nusa Indah	Jogjogan	Cisarua	Alwi
8.	Kelompok Tani Sauyunan	Sukawangi	Sukamakmur	Purbowo
9.	Kelompok Tani Tunas Muda Mandiri	Batulayang	Cisarua	Ahmad Mudrikah
10.	Kelompok Wanita Tani Al Mina	Ciawi	Ciawi	Siti Solihat



Keluaran dari sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan tahun 2025 adalah terbitnya 5 sertifikasi prima 3. Namun, tahun ini sertifikasi prima 3 yang terbit sudah melebihi target yakni sebanyak 19 sertifikat.

➤ **Kelompok Substansi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan**

Peran Tim Kelembagaan Dan Informasi Keamanan Pangan Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Di Kabupaten Bogor

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Penyelenggaraan keamanan pangan ini bertujuan untuk menjaga agar pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor melalui Tim Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan (KIKP) hadir dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada pelayanan dan peningkatan pengetahuan dan kualitas masyarakat terkait keamanan pangan, diantaranya adalah Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, beberapa giat yang dilaksanakan adalah Edukasi Keamanan Pangan yang difokuskan untuk desa yang masuk rawan pangan kategori 3 dan 4 dari peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA). Dari 435 desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Bogor, terdapat 259 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori 3 dan 4 berdasarkan peta FSVA. Untuk tahun 2025, edukasi keamanan pangan dilaksanakan di 17 desa/kelurahan diantaranya adalah Desa Bojong Indah, Desa Pamager Sari Kecamatan Parung, Desa Nangerang, Desa Sukmajaya Kecamatan Tajurhalang, Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur, Desa Kedung Waringin, Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede, Desa Putat Nutug, Desa Cibeuteung Muara Kecamatan Ciseeng, Desa Megamendung, Desa Cipayung Kecamatan Megamendung, Desa Jambu Luwuk, Desa Citapen Kecamatan Ciawi, Desa Cilebut Barat, Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja, Desa Citeureup, Desa Tajur Kecamatan Citeureup.

Selain Desa rawan pangan, edukasi keamanan pangan juga dilakukan di 30 Sekolah Menengah Pertama di Kab. Bogor. Diantaranya SMPN 2 Babakan Madang, SMPN 2 Bojonggede, SMPN 2 Caringin, SMPN 1 Ciampea, SMPN 1 Ciawi, SMPN 1 Cibinong, SMPN 3 Cibinong, SMPN 3 Cibungbulang, SMPN 1 Cibungbulang, SMPN 2 Cisarua, SMPN 1 Cigudeg, SMPN 1 Cigombong, SMPN 2 Cigombong, SMPN 1 Cijeruk, SMPN 2 Cileungsi, SMPN 3 Cileungsi, SMPN 2 Ciomas, SMPN 2 Citeureup, SMPN 3 Citeureup, SMPN 2 Dramaga, SMPN 2 Gunungputri, SMPN 1 Tenjolaya, SMPN 1 Leuwiliang, SMPN 1 Leuwisadeng, SMPN 1 Megamendung, SMPN 2 Megamendung, SMPN 1 Parung, SMPN 2 Pamijahan, SMPN 1 Tajurhalang, SMPN 2 Tamansari.

Tindak lanjut dari edukasi keamanan pangan disekolah adalah dengan diadakannya perlombaan video kreatif tentang keamanan pangan. Harapan diadakannya lomba ini akan semakin luas pemahaman dan penerapan keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari serta semakin terjaminnya pangan yang aman yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lomba Video kreatif juara 1 SMPN 1 Klapanunggal, juara 2 SMPN 1 Jonggol, dan juara 3 SMPN 3 Cibinong.

Selain edukasi, untuk menguatkan kelembagaan keamanan pangan, Rapat koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) yang melibatkan instansi-instansi pengampu keamanan pangan di Daerah Perbatasan juga dilaksanakan. Topik yang diambil dalam rapat koordinasi adalah Optimalisasi Peran JKPD dalam mewujudkan

Sistem Pengawasan Keamanan Terpadu khususnya pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Perbatasan”. Pada rapat koordinasi tersebut terbentuk berita acara dan rekomendasi yang ditanda-tangani oleh peserta.

Untuk penguatan kelembagaan di luar lingkungan Kabupaten Bogor, dilaksanakan juga perjanjian kerjasama bidang keamanan pangan yang melibatkan dinas-dinas di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor yang menangani keamanan pangan. Maksud dilaksanakan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengamankan lalu lintas peredaran pangan yang masuk dan keluar Kabupaten Bogor. Di tahun ini, perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan Kota Depok, perpanjangan PKS dengan Kabupaten Sukabumi dan Kota Bogor. Total kerjasama yang sudah dilaksanakan dengan wilayah perbatasan terkait keamanan pangan sudah mencapai 10 kerjasama. Selain 2 kabupaten/kota tersebut di atas, perjanjian kerjasama ini juga sudah dilaksanakan dengan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Selain melakukan kerjasama dengan instansi/dinas terkait di wilayah perbatasan, untuk menguatkan peran keamanan pangan di Kabupaten Bogor, dilaksanakan juga kerjasama dengan Institusi pendidikan yaitu Universitas Djuanda yang menitik beratkan kepada sains dan teknologi serta fasilitasi mahasiswa/i dalam program Praktek Kerja Lapang/Magang terkait pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di wilayah Kabupaten Bogor. Institusi lain yang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor adalah Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Pasar Tohaga terkait pengawasan keamanan pangan di tingkat peredaran pasar tradisional.

Selain terlibat dengan penguatan kelembagaan keamanan pangan, Tim KIKP juga melaksanakan tugas lainnya yaitu memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan nomor izin edar Registrasi PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK).



Upaya pemerintah untuk memberikan penjaminan dan legalitas keamanan pangan salah satunya melalui mekanisme perizinan pangan segar yang akan diedarkan dalam kemasan eceran oleh pelaku usaha. Ketentuan perizinan berusaha tersebut telah tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 tahun 2025 tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Subsektor Pangan Segar. Jenis perizinan untuk pangan segar yang beredar mencakup izin edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL), izin edar Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD), dan registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK). Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu menerbitkan registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlakuan istimewa diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil melalui kemudahan berusaha. Kemudahan tersebut berupa pemberian izin di awal, dengan pemenuhan persyaratan teknis setelah izin diterbitkan. Kemudahan ini juga berlaku untuk perizinan bidang ketahanan pangan yaitu Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan oleh usaha mikro dan kecil (Registrasi PSAT-PDUK). Dalam registrasi PSAT-PDUK, pelaku usaha dapat memperoleh nomor registrasi PSAT-PDUK hanya dengan melengkapi persyaratan administrasi diantaranya adalah Surat Permohonan Pengajuan Registrasi, Keterangan informasi produk dan mengisi surat pernyataan komitmen keamanan pangan.

Registrasi ini diberikan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten/Kota yang dalam hal ini melekat pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Penerbitan legalitas keamanan pangan yang merupakan penjaminan keamanan pangan untuk PSAT PDUK dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor yang dimulai sejak awal Tahun 2021 dengan terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor selaku ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten/Kota.

Sosialisasi Registrasi PSAT-PDUK dilaksanakan dengan tujuan Pelaku Usaha UMKM khususnya di bidang PSAT mengetahui adanya no. Izin edar untuk produk PSAT. Dalam sosialisasi juga dijelaskan mengenai kategori komoditas yang masuk ke PSAT serta cara mendaftarkannya. Telah dilaksanakan di 16 Kecamatan yaitu Caringin, Cigombong, Tajurhalang, Bojonggede, Ciampea, Dramaga, Ciseeng, Parung, Megamendung, Ciawi, Sukaraja, Babakan Madang, Sukamakmur, Tanjungsari, Jonggol, dan Cariu. Untuk peserta kita bekerjasama dengan Forum UMKM Kabupaten Bogor.

Bimtek Pelaku Usaha PSAT dilaksanakan 1 angkatan dengan jumlah 30 orang. Bimtek dilaksanakan untuk pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya No. Registrasi PSAT-PDUK. Bimtek dilaksanakan dengan tujuan meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku usaha pangan, khususnya pelaku usaha PSAT di Kabupaten Bogor terkait pentingnya keamanan pangan dalam produk pangan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha tersebut.

Tahun 2025 pelaku usaha yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor registrasi izin edar PSAT-PDUK adalah sebanyak 16 pelaku usaha dengan total jumlah nomor izin edar yang telah diterbitkan sebanyak 465 nomor izin edar. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan registrasi ini tersebar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor dan dengan jenis Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beragam juga. Mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, rempah-rempah sampai dengan bumbu masak yang dibuat tanpa ada bahan tambahan lainnya.

Selain memfasilitasi dalam pembuatan No. Registrasi PSAT-PDUK, kita juga melaksanakan temu usaha yang bertujuan menghubungkan Pelaku Usaha yang telah mengajukan No. Registrasi PSAT-PDUK dengan pihak retail sehingga bisa memperluas kemitraan. Tahun ini retail yang diundang dari Grand Lucky Superstore. Selain

itu diadakan pembinaan dengan bentuk dikumpulkan pelaku usaha yang telah mendapatkan logo putih, topik yang dibahas mengenai pemenuhan standar keamanan pangan yang baik serta regulasi mengenai label dan kemasan.

#### ➤ **UPT Pengujian Mutu Pangan Segar**



Keamanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat harus aman, bermutu, dan bergizi. Dalam konteks pemerintahan daerah, Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan aktivitas produksi dan distribusi pangan yang tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin bahwa pangan segar yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.

Dalam praktiknya, pengawasan keamanan pangan segar di daerah kerap menghadapi tantangan berupa keterbatasan data laboratorium yang sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan tren cemaran pangan dan tingkat kepatuhan pelaku usaha sulit dipetakan secara akurat. Oleh karena itu, keberadaan **UPT Pengujian Mutu Pangan Segar** di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menjadi sangat penting sebagai unit teknis yang berfungsi menyediakan data ilmiah melalui pengujian laboratorium yang terencana dan terstandar.

UPT Pengujian Mutu Pangan Segar berperan sebagai institusi pengujian independen yang melaksanakan pengujian keamanan dan mutu **Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)**, baik pada tahap **pra-pasar (pre market)** maupun **pasca-pasar (post market)**. Parameter pengujian meliputi cemaran kimia berbahaya seperti residu pestisida, klorin, formalin, dan boraks, serta pengujian mutu beras berdasarkan persyaratan teknis dan standar nasional.

#### **Tujuan dan Sasaran Kegiatan**

Kegiatan pengujian keamanan dan mutu pangan segar bertujuan melindungi konsumen melalui pengujian laboratorium yang sistematis, sekaligus memberikan jaminan bahwa pangan segar yang beredar di Kabupaten Bogor telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk memantau keamanan pangan di lokasi produksi dan distribusi, mengidentifikasi cemaran pangan yang berisiko terhadap kesehatan, meningkatkan kapasitas laboratorium melalui kalibrasi peralatan dan validasi metode, serta membangun basis data keamanan pangan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Sasaran kegiatan meliputi kelompok tani dan gabungan kelompok tani (termasuk kelompok tani beras ASN), pasar tradisional dan pasar modern, pelaku usaha PSAT/PDUK, kegiatan Gerakan Pangan Murah, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis.

## Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengujian dilakukan dengan mengikuti protokol baku, dimulai dari tahap pengambilan sampel sesuai **SNI 19-0428-1998**, yang meliputi identifikasi lokasi, pengambilan sampel secara representatif, dokumentasi, serta penyimpanan dan transportasi sampel dalam kondisi terkontrol.

Analisis laboratorium dilakukan mengacu pada regulasi Badan Pangan Nasional, antara lain **Peraturan BPN Nomor 10 Tahun 2024**, **Peraturan BPN Nomor 15 Tahun 2024**, **Peraturan BPN Nomor 2 Tahun 2023**, serta **SNI 6128 Tahun 2020**. Metode pengujian menggunakan berbagai peralatan laboratorium, baik rapid test kit untuk cemaran kimia maupun metode gravimetri dan mekanik untuk pengujian mutu beras.

## Hasil dan Capaian Kegiatan

Selama periode **Januari–November 2025**, UPT Pengujian Mutu Pangan Segar telah melaksanakan pengujian terhadap berbagai sasaran, meliputi 17 kecamatan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah, 38 pasar dan toko, 22 pelaku usaha PSAT, 27 dapur Makan Bergizi Gratis, serta kelompok tani dan gapoktan.

Total pengujian keamanan pangan yang telah dilakukan mencapai **963 sampel**, dengan **Persentase Keamanan Pangan sebesar 95,22%**. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pangan segar asal tumbuhan yang beredar di Kabupaten Bogor berada dalam kondisi aman untuk dikonsumsi, meskipun masih ditemukan sejumlah kecil sampel dengan cemaran pestisida, formalin, dan boraks yang memerlukan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, pengujian mutu beras terhadap **87 sampel** menunjukkan bahwa sebagian besar beras yang beredar masih berada **di bawah standar mutu medium**, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan mutu pascapanen dan tata niaga beras di Kabupaten Bogor.

## Kesimpulan



Secara keseluruhan, kegiatan UPT Pengujian Mutu Pangan Segar Kabupaten Bogor Tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan konsumen dan penguatan sistem keamanan pangan daerah. Data hasil pengujian menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan, peningkatan pengawasan, serta pembinaan pelaku usaha pangan. Ke depan, penguatan kapasitas laboratorium dan keberlanjutan pengujian rutin diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan segar secara konsisten di Kabupaten Bogor.

